



Sistem Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batu Bara

Suhendri Suhendri

Universitas Asahan, Indonesia

Alamat: Jl. Jend. A. Yani, Kisaran Naga, Kec.Kota Kisaran Timur, Kisaran, Sumatera Utara 21216

Korespondensi penulis: suhendritteknik@email.com*

Abstract. *The development of information technology has significantly transformed government administration, including the promotion system for Civil Servants (PNS). The National Civil Service Agency (BKN) has developed the Civil Service Administration Information System (SIASN) to expedite the PNS promotion process digitally. However, implementing this system still faces several challenges, such as a lack of employee understanding, limited human resources, and technical issues in system usage. This study aims to analyze the effectiveness of the promotion service system implemented by the Personnel and Human Resource Development Agency (BKPSDM) of Batu Bara Regency. The study employs interviews, observations, and document analysis to identify key issues in the promotion process and provide recommendations to enhance service efficiency and quality. The findings indicate that although a digital system has been adopted, its implementation still encounters obstacles, such as incomplete data, inadequate technological infrastructure, and employees' limited ability to operate the system. Therefore, improving employee training, strengthening technological infrastructure, and refining administrative policies are recommended measures to enhance the effectiveness of the PNS promotion service system in Batu Bara Regency.*

Keywords: *Civil Service Administration Information System, PNS Promotion, BKPSDM, Service Effectiveness, E-Government.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam administrasi pemerintahan, termasuk dalam sistem kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian (SIASN) untuk mempercepat proses kenaikan pangkat PNS secara digital. Namun, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman pegawai, keterbatasan sumber daya manusia, serta kendala teknis dalam penggunaan sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pelayanan kenaikan pangkat yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Batu Bara. Studi ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam proses kenaikan pangkat serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem digital telah diterapkan, masih terdapat hambatan dalam implementasinya, seperti ketidaksempurnaan data, kurangnya infrastruktur teknologi, dan keterbatasan kemampuan pegawai dalam menggunakan sistem. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan bagi pegawai, penguatan infrastruktur teknologi, serta penyempurnaan kebijakan administrasi menjadi langkah yang disarankan untuk meningkatkan efektivitas sistem pelayanan kenaikan pangkat PNS di Kabupaten Batu Bara.

Kata kunci: Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian, Kenaikan Pangkat PNS, BKPSDM, Efektivitas Pelayanan, E-Government.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor pemerintahan. Instansi pemerintah diharuskan untuk beradaptasi dengan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personal public diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik (Harbani, 2020). Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia di sektor publik. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan atas kinerja dan dedikasi pegawai, tetapi juga berperan dalam meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Di Indonesia, sistem kenaikan pangkat PNS diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dilaksanakan melalui berbagai instansi pemerintah, termasuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di tingkat daerah.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, BKN telah memperkenalkan Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian (SIASN) yang bertujuan untuk mempermudah proses pengajuan dan pengelolaan kenaikan pangkat. Dengan adanya sistem ini, seluruh proses mulai dari pengusulan hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) dapat dilakukan secara digital, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam administrasi kepegawaian (Tambunan 2021).

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan sistem pelayanan kenaikan pangkat di lapangan. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain adalah kurangnya pemahaman pegawai mengenai prosedur yang berlaku, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola proses ini, serta masalah teknis dalam penggunaan sistem informasi (Rika Widianita 2023). Keterlambatan dalam penerbitan SK kenaikan pangkat juga menjadi masalah yang signifikan, yang dapat berdampak pada kepuasan pegawai dan kepercayaan terhadap sistem yang ada.

Dalam konteks Kabupaten Batubara, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pelayanan kenaikan pangkat PNS yang diterapkan oleh BKPSDM setempat. Dengan memahami berbagai aspek dari sistem ini, termasuk kelebihan dan kekurangan yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada PNS. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam manajemen kenaikan pangkat PNS di Kabupaten Batu Bara.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Sistem

Sistem adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks teknologi dan ilmu komputer, sistem sering merujuk pada sistem komputer, yang terdiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), serta

jaringan yang menghubungkan perangkat- perangkat tersebut. Sistem ini dirancang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu, seperti pengolahan data, komunikasi, dan kontrol.

Dalam kamus WebsterNew Collegiate Dictionary menyatakan bahwa kata“syn” dan “Histanai” berasal dari bahasa Yunani, artinya menempatkan bersama. Sehingga menurut Arifin Rahman bahwa Pengertian Sistem adalah sekumpulan beberapa pendapat (Collection of opinions), prinsip-prinsip, dan lain-lain yang telah membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan antar satu sama lain.

Pengertian Informasi

Informasi adalah data yang telah diproses, disusun, dan disajikan dalam bentuk yang memiliki arti dan nilai bagi pengguna. Informasi ini dapat berupa fakta, data, atau kebijakan yang telah dianalisis dan dapat digunakan untuk membuat keputusan, memecahkan masalah, atau mendukung pemahaman.

Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima (Fahmi, I. 2023). Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Informasi adalah data yang diolah dari satu atau berbagai sumber yang memberikan nilai dan manfaat bagi penerima.

Pengertian SAPK(Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), dapat digunakan secara online oleh seluruh mitra kerja BKN untuk pelayanan kepegawaian seperti informasi PNS, Kenaikan Pangkat, Pensiun, Penetapan NIP dan mutasi lainnya, SAPK ini adalah sebagai wujud pelayanan publik berbasis E-gov. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis electronic government tertuang dalam kebijakan pemerintah tentang implementasi electronic government tahun 2003 bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi akses, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara akurat dan cepat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan.

Kebijakan pemerintah tentang implementasi e-government tahun 2003 menekankan untuk menggunakan informasi teknologi di instansi pemerintah pusat maupun daerah, yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Pemanfaatan teknologi Informasi dibidang kepegawaian bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam bidang pengolahan data dan pengelolaan informasi kepegawaian, sehingga mampu memberikan pelayanan kepegawaian yang lebih baik, transparan dan akuntabel (Nurmayanti, N., Parida, M., & Yuansyah, M. R.2022).

Pelaksanaan SAPK didukung dengan penerapan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan mengeluarkan Peraturan Kepala BKN nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Sebagai langkah dalam meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dilakukannya perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis komputer. Pemanfaatan teknologi informasi berupa SAPK salah satunya berupa pelayanan kenaikan pangkat pegawai.

Pelaksanaan untuk kenaikan pangkat, bisa juga kita lihat dari alur penerbitan NPKP (nota persetujuan kenaikan pangkat), berbicara masalah teknis di lapangan. Pertama, daerah merekon terlebih dahulu untuk mengumpulkan data-data yang akan naik pangkat. Setelah itu rekon ke BKN, di BKN ada suatu program lewat mailtracking untuk mengetahui data yang harus direkon (dicocokkan dengan data BKN), pegawai harus melampirkan syarat-syarat kenaikan pangkat, di BKD akan membuat file di excel (ada nama, nip dan berkas apa saja yang ada didalamnya). Setelah itu, di BKN menerima berkas-berkas kenaikan pangkat, sebelum itu di data dulu dan dimasukkan berdasarkan masing-masing kabupaten dan jumlah berkas, di PU di kroscek ulang, setelah data valid berkas tersebut akan diberikan kepada teknis dengan memberika nomor persetujuan (nomor masuk berkas)”

3. METODE PENELITIAN

Data Penulisan ini penulis menggunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut.

a. Metode Pengamatan (*observasi*)

Mempersiapkan hal-hal yang perlu untuk persiapan kerja praktek, antara lain: Mencari tempat untuk melaksanakan kerja praktek, mengirim surat permohonan, Pengenalan instansi, petunjuk operasi di lapangan dan hal hal yang penting lainnya.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Perolehan data melalui buku-buku di perpustakaan, literatur dan bentuk laporan lainnya yang dianggap relevan.

c. Penelitian Lapangan (Filed Research)

Melihat dari dekat keadaan lapangan, pengelanaan pada pimpinan dan karyawan instansi yang diinginkan dan selesai tepat waktu. Adapun Metode-Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan Melakukan pengamatan langsung, Diskusi dengan pembimbing di instansi dan para karyawan langsung dan Diskusi dengan pembimbing di instansi dan para karyawan langsung.

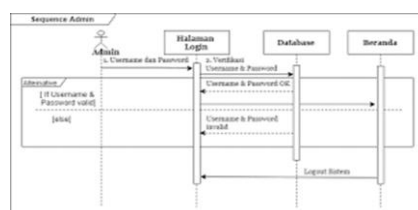
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Unified Modeling Language* (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah suatu bahasa standar yang digunakan untuk membuat diagram visual yang menggambarkan sistem perangkat lunak. Sederhananya, UML adalah seperti "peta" atau "blueprint" yang membantu kita memahami dan merancang sebuah sistem, baik itu sistem informasi, aplikasi mobile, atau perangkat lunak lainnya. UML adalah alat yang sangat berharga bagi para pengembang perangkat lunak dan analis sistem. Dengan memahami konsep dasar UML dan berbagai jenis diagramnya, kita dapat merancang sistem yang lebih baik, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah dipelihara.

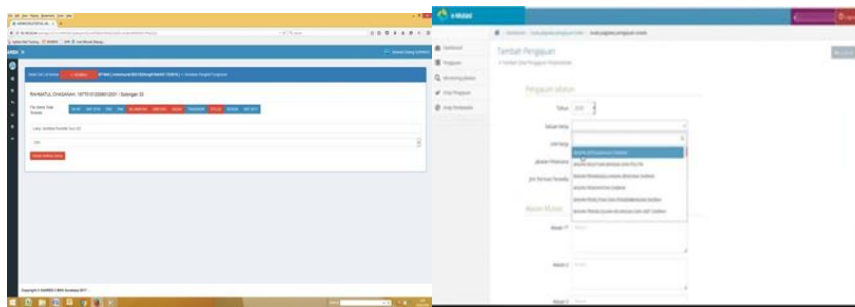
Pengertian *Sequence Diagram*

Sequence Diagram merupakan sebuah diagram yang menggambarkan kelakuan dari objek yang ada pada use case dengan cara mendeskripsikan waktu kejadian objek dan pesan yang akan dikirim dan diterima oleh antar objek. *Sequence Diagram* harus digambarkan sebanyak pendefinisian use case yang memiliki proses tersendiri dan serta semua use case yang telah didefinisikan interaksi jalannya pesan sudah dicakup pada diagram sequence maka semakin banyak use case yang didefinisikan maka semakin banyak diagram sequence yang harus dibuat.(Informasi & Royal, 2024).

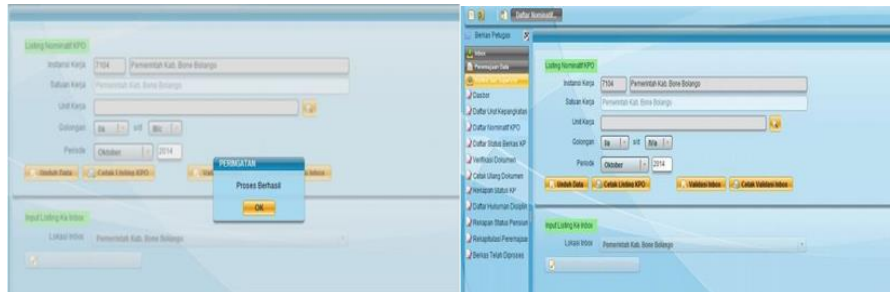


Gambar 2 *Sequence Diagram*

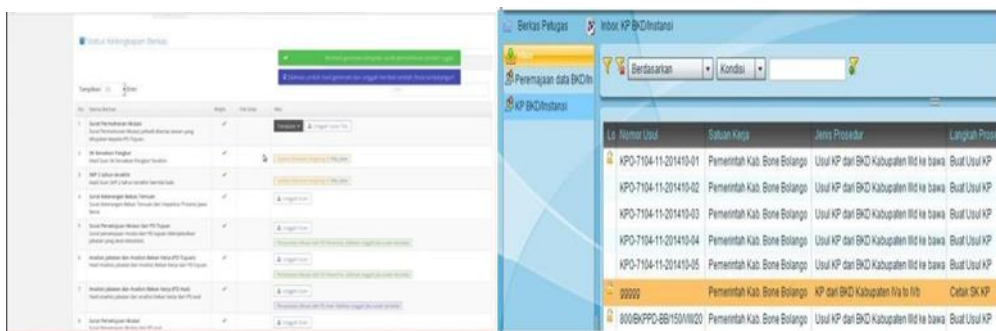
Tampilan dan Design



Gambar 3 Tampilan Menu dan Dashboard



Gambar 4 Tampilan Menu Data Linsting KPO dan Pengajuan Staf



Gambar 5 Tampilan Menu Lengkapi Berkas dan Pengajuan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian di kantor dinas BKPSDM di kabupaten batu bara dan diteruskan derngan penyusunan laporan,maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Badan Kepegawaian Batubara telah melaksanakan inovasi pelayanan pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang di dalamnya terdapat aplikasi kenaikan pangkat berbasis paper less. Hasilpenyajian data dan analisis pada bab IV penulis dapat menyimpulkan Badan Kepegawaian Negara telah melakukan usaha yang optimal dalam membantu mensukseskan sistem paper less , dapat dilihat dari alur mekanisme/posEDURE kenaikan pangkat yang jelas dan terbuka, adanya buku saku SAPK untuk lebih membantu kabupaten/kota serta telah sesuai dengan SOP.

2. Faktor penghambat pelayanan kenaikan pangkat melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) ini adalah data yang masih belum akurat, hasil dari scan data yang masih belum sempurna serta sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Serta SDM yang masih belum siap dengan perubahan sistem ini, selebihnya masih ada yang menggunakan berkas.
3. Faktor pendukung pelayanan kenaikan pangkat melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) ini adalah kesiapan dari para pegawai Badan Kepegawaian Batubara dengan adanya perubahan khususnya pada pelayanan kenaikan pangkat yang sekarang menjadi paper less ini, adanya motivasi dan semangat kerja serta dukungan penuh para pegawai Badan Kepegawaian Batubara terhadap perubahan ini.

Saran

Berdasarkan penyajian data, pembahasan hingga kesimpulan di atas, peneliti akan memberikan beberapa saran yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pelayanan kenaikan pangkat pegawai melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) pada Badan Kepegawaian Batubara sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Batubara harusnya mengadakan diklat terhadap para pegawai tentang pentingnya kenaikan pangkat berbasis paper less melalui SAPK agar pegawai tersebut memiliki kemauan untuk berubah serta menyeleksi lebih banyak petugas yang berlatar belakang TI karena kemungkinan kesulitan akan sangat kecil karena ditangani langsung oleh ahlinya. Keberhasilan SAPK tergantung pada setiap kemampuan dan kemauan dari SDM-nya sendiri.
2. Instansi kabupaten/kota seharusnya dapat mengirimkan bentuk hasil scan berkas kenaikan pangkat yang telah sempurna kepada Badan Kepegawaian Batubara, karena hal tersebut dapat membantu pekerjaan pegawai di Badan Kepegawaian Negara Batubara menjadi lebih ringan.
3. Badan Kepegawaian Negara Batubara perlu menambahkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan SAPK seperti penambahan jumlah komputer, penambahan server internet serta pendingin ruangan yang memadai.

DAFTAR REFERENSI

- Cahyono, D. E., & Jayanti, A. (2022). Implementasi aplikasi kasir berbasis web pada Toko Ghafya Fruits Shop. *Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika*, 10(1), 32-40.
- Fahmi, I. (2020). *Manajemen strategis teori dan aplikasi*. Alfabet.
- Febryansyah, B. (2012). *Skripsi kinerja birokrasi pemerintahan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karimun (Studi Kasus di Kecamatan Karimun)*. Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU.
- Fifin Sonata, & Vina Indah Sari. (2020). Pemanfaatan UML dalam perancangan sistem informasi E-commerce jenis customer-to-customer (Unified Modeling Language).
- Fitri Dayana, E. (2012). *Skripsi kinerja pegawai negeri sipil pada Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Riau*. Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU.
- Harban. (2020). *Metode penelitian administrasi publik*. Alfabeta.
- Hasibuan, M. S. P. (2007). *Manajemen sumber daya manusia (Edisi revisi)*. Bumi Aksara.
- Henry, N. (1995). *Administrasi negara dan masalah-masalah publik*. Rajawali Press.
- Husein, H., & Wibowo, W. (2006). *Sistem informasi untuk pengambilan keputusan dan pengawasan dalam organisasi*.
- Jartarghar, H. A., Rao Salanke, G., Kumar, A. A., & Dalali, S. (n.d.). React apps with server-side rendering: Next.js. *Journal of Telecommunication*.
- Nurmayanti, N., Parida, M., & Yuansyah, M. R. (2022). Sistem pendukung keputusan kelayakan kenaikan pangkat jabatan fungsional (ASN) metode TOPSIS. *Jurnal Informasi dan Komputer*, 10(1), 89-96.
- Roberts, S. (2000). *Sistem informasi: Kombinasi teknologi, proses bisnis, dan orang*.
- Soedewi, S., Mustikawan, A., & Swasty, W. (n.d.). Penerapan metode design thinking pada perancangan website UMKM Kirihiuci.
- Sommerville, I. (2011). *Software engineering*. Pearson.
- Stair, R., & Reynolds, G. (2006). *Sistem informasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data*.
- Sugiono. (2022). *Rancangan sistem aplikasi dan tindakan*. Alfabeta.
- Tailwind CSS. (n.d.). Sebuah framework CSS untuk developer yang memiliki phobia terhadap CSS. www.multidukasi.co.id.
- Tambunan. (2021). *Analisis kebijakan publik (Konsep, teori, dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar.
- Triyono, S., Rosiana, S., & Gunawan, T. (2020). Perancangan sistem informasi absensi guru dan staff pada SMK Pancakarya Tangerang berbasis web. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 4(2).
- Widianita, R. (2023). *Manajemen kepegawaian sipil di Indonesia*. PT. Kencana.